

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU



OLEH :

RYAN PRAMANA PUTRA
185310261

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH :

**RYAN PRAMANA PUTRA
185310261**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui prinsip *value for money*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Data yang diminta berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 dan 2020. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*. Pada tahun 2019, ada 13 program dan 117 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 2 dari 117 kegiatan (1,71%) yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Pada tahun 2020, terdapat 5 program dengan 92 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 1 dari 92 kegiatan (1,09%) yang memenuhi 3 elemen *value for money*. Sebaiknya kepala dinas lebih serius lagi dalam mengoptimalkan kegiatan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata kunci: ekonomis, efisiensi, efektivitas, *value for money*, kinerja

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance accountability of the Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau through the principle of value for money. This research is qualitative research. This study uses interview documentation as a data collection technique. The data requested is in the form of a Performance Report of the Government Agencies of the Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau and a Report on the Realization of the Budget for the Department of Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau in 2019 and 2020. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that the accountability for the performance of the Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau in 2019 and 2020 has not met the value for money principle. In 2019, there were 13 programs and 117 activities carried out, but only 2 out of 117 activities (1,71%) met the 3 elements of value for money. In 2020, there were 5 programs with 92 activities carried out, but only 1 out of 92 activities (1,09%) met the 3 elements of value for money. It is better for the head of the department to be more serious in optimizing the activities that have been determined. Thus, the accountability of the performance of the Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau has not met the value for money principle.

Keywords: *economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan dengan judul “**Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau**”, guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nina Nursida, SE., M.Acc selaku Sekretaris Jurusan Program Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna di kemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
7. Kepada Mama Ina, Kak Nia, dan Keponakan Keinarra atas segala kasih sayang, dukungan, perhatian, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada Nya.
8. Kepada Jabir Muzafa, Indri Adinda Meitri, Athaya Zhafira, Vivi Oriza Sativa,

M. Pimpino dan teman-teman *se-circle* yang selalu dengan sabar membantu, mengajarkan, dan memberikan semangat moral kepada penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan studi ini dengan baik, dan tak lupa juga untuk teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi Kelas B (2018) atas canda tawa, suka duka yang sudah dilewati bersama selama kurang lebih 4 tahun ini.

9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Ryan Pramana Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL	
NOTULENSI SEMINAR HASIL.....	
HALAMAN KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja	13
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	13
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	15
2.1.4 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja.....	16

	2.1.5	Keuntungan Pengukuran Kinerja.....	17
	2.1.6	Satuan dan Kriteria Unit Kerja	19
	2.1.7	Pengertian Indikator Kinerja	19
	2.1.8	Peran Indikator Kinerja Bagi Pemerintah	20
	2.1.9	Pengertian Organisasi Sektor Publik	20
	2.1.10	Pengertian <i>Value For Money</i>	21
	2.1.11	Implementasi Konsep <i>Value For Money</i>	22
	2.1.12	Indikator <i>Value For Money</i>	23
	2.1.13	Penelitian Terdahulu	24
	2.1.14	Kerangka Pemikiran	25
	2.2	Hipotesis	26
BAB III		METODE PENELITIAN	27
	3.1	Desain Penelitian	27
	3.2	Objek Penelitian	27
	3.3	Definisi Variabel Penelitian.....	27
	3.3.1	<i>Value For Money</i>	28
	3.3.2	Kinerja Keuangan	30
	3.4	Jenis dan Sumber Data.....	30
	3.4.1	Jenis Data	31
	3.4.2	Sumber Data	31
	3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
	3.6	Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
	4.2	Hasil Perhitungan <i>Value For Money</i>	36
	4.3	Pembahasan	110
BAB V		SIMPULAN DAN SARAN.....	118
	5.1	Simpulan	118
	5.2	Saran.....	119
		DAFTAR PUSTAKA	120
		LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Rupiah)	5
Tabel 1.2 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 (dalam Rupiah)	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2019	36
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Tahun 2020.....	42
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2019	47
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Ekonomis Dinas Tahun 2020	59
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2019	68
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Tahun 2020	80
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2019	89
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Tahun 2020.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kinerja organisasi sektor publik menjadi sorotan karena semakin tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut kejelasan dan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, namun dengan adanya tuntutan kejelasan dan akuntabilitas publik, maka instansi pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja bukan hanya sekedar mengukur akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan penanganan keuangan daerah, dan akuntabilitas juga bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang membuktikan

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Basri, 2018).

Menurut Husna (2018), Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, Pengukuran kinerja organisasi sektor publik kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk bisa membantu pemerintah berfokus pada tujuan serta target program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan mempertinggi efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. ke 2, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya serta pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Menurut Pratiwi (2017) Pengukuran dalam kinerja sektor publik menggunakan metode *Value For Money*. *Value for money* merupakan pokok penting dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Indikator *value for money* mendasarkan pada tiga bagian utama, yaitu : ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisien yaitu perbandingan input atau output dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektif yaitu tingkat capaian hasil dari program dengan target yang 3 sudah ditetapkan, secara sederhana efektif adalah perbandingan outcome dengan output.

Menurut Majid (2019) *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya

memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan.

Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu sama lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan

(*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014) Tujuan dari pelaksanaan dalam pertanggungjawaban *value for money*, yaitu :

1. Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya.
2. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminalkan dan hasilnya dimaksimalkan.
3. Efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Ada beberapa tambahan elemen dari ketiga elemen diatas yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Sedangkan pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Menurut Mardiasmo (2018) manfaat dari penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik adalah dapat meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih tepat sasaran, meningkatkan bobot pelayanan publik, mengoptimalkan efisiensi biaya pelayanan publik, penerapan belanja lebih ke arah kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran bahwa uang publik ialah inti dari pengoperasian akuntabilitas publik. Menurut Dwinanda (2018), Elemen ekonomis dihitung dengan membandingkan nilai realisasi anggaran dengan anggarannya, elemen efisiensi dihitung dengan membandingkan persentase hasil yang didapat

dari suatu kegiatan dengan persentase nilai ekonominya, elemen efektivitas dihitung dengan membandingkan persentase dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dengan persentase hasil yang didapat dari suatu kegiatan. Konsep *value for money* diterapkan dengan menghitung nilai masing-masing elemen dengan cara membandingkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kinerja. Hasil dari perhitungan masing-masing elemen akan dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk melihat seberapa efektif, efisien, dan ekonomis kinerja yang telah dilakukan oleh Instansi. Hasil perhitungan konsep *value for money* akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kinerja Instansi pemerintah.

Salah satu instansi pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Setiap tahunnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau membuat program dan kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi untuk masing-masing program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1

Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Rupiah)

No	Program	2019		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.333.670.774	6.079.990.714	82.91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457.335.000	290.267.839	63.47
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	251.400.000	199.700.000	79.44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	240.525.030	211.796.450	88.06

Tabel 1.1
(Lanjutan)

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.034.080.660	928.508.010	89.79
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.236.183.364	2.071.651.049	64.02
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	488.544.950	427.506.140	87.51
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	486.879.988	453.291.778	93.10
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3.658.353.072	2.906.141.027	79.44
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	12.209.489.407	7.345.204.004	60.16
11	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	207.501.335	175.131.454	84.40
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	5.321.904.416	852.636.542	16.02
13	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	1.207.029.500	890.032.390	86.66
Jumlah Belanja		32.474.544.424	22.831.857.397	70.30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Tabel 1.2

Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 (dalam Rupiah)

No	Program	2020		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.881.689.600	4.538.265.634	92.97

Tabel 1.2
(Lanjutan)

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.625.000	216.738.523	95.22
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.548.280.716	3.229.072.142	71.00
4	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	6.195.875.530	5.728.426.858	92.46
5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	13.474.791.058	4.894.728.290	36.33
Jumlah Belanja		29.328.261.904	18.607.231.447	63.44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Menurut laporan alokasi dan realisasi anggaran instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau periode 2019 dan 2020, realisasi pengeluaran keuangan untuk masing – masing yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selama ini lebih kecil daripada target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 terdapat 13 program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Pada tahun 2020 terdapat 5 program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Berdasarkan laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020, tidak terdapat realisasi anggaran penuh pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat juga beberapa program yang masih dibawah 80% pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 terdapat enam program yang masih dibawah 80% yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 63,47%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 79,44%, Program Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar 64,02%, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebesar 79,44%, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sebesar 60,16% dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan sebesar 16,02%. Pada tahun 2020 terdapat dua program yang masih dibawah 80% yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar 71,00%, Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebesar 36,33%.

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan persentase sebesar 93,10% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan persentase sebesar 95,22%. Sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2019 dan 2020 adalah Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dengan persentase sebesar 16,02% dan Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan persentase sebesar 36,33%.

Realisasi anggaran 2019 dan 2020 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran masih belum terserap maksimal. Untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah ekonomis, efisien dan efektif, maka dibutuhkan pengukuran kinerja. Salah satu cara dalam mengukur dan mengatur kinerja keuangan sektor publik adalah dengan menerapkan *value for money*. *Value for money* dibutuhkan agar pengeluaran dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dibuat. Pengeluaran yang dimanfaatkan sebaik – baiknya akan memberikan *output* yang baik sehingga akan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi ?
3. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengukur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai sarana yang tepat dalam menerapkan teori akuntansi dan yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta dapat berbagi ilmu pengetahuan yang berfokus dengan masalah konsep *value for money*.

2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang penilaian.

3. Peneliti lainnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau inspirasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat dan untuk pemahaman bagi penulis, sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab diantaranya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan proposisi (pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa disebut dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2020 agar pengelolaan data dapat diolah secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Riau, sedangkan dengan saran berisikan implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2013), kinerja adalah kondisi atau gambaran yang berhubungan dengan tingkat tercapainya suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sektor publik yang tertuang dalam perumusan skema skema strategic planning. Secara umum kinerja adalah suatu gambaran keberhasilannya organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu teknik evaluasi dalam kemajuan pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Dwinanda, 2018). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah evaluasi terhadap keberhasilan dalam suatu pencapaian dari sasaran dan tujuan organisasi.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Yuesti (2020) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk menginformasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur kelanjutan pencapaian strategi
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi agar mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk menilai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Mahmudi (2015) Pengukuran kinerja merupakan bagian terpenting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik, yaitu :

- a. mengukur tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. memperbaiki kinerja periode berikutnya.
- d. memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum ada 4 tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik. Namun, setiap instansi atau perusahaan memiliki tujuan sistem pengukuran kinerja masing-masing yang mana dari 4 tujuan diatas dapat

dikembangkan kembali sesuai dengan latar belakang perusahaan dan instansi tersebut.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Sektor publik dalam pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) antara lain untuk :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen di organisasi sektor publik
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Yuesti (2020) manfaat dari pengukuran kinerja, yaitu :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah dipakai.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

2.1.4 Aspek – Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Rempowatu & Tirayoh (2016), pengukuran kinerja meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*): segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*): ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*): sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).

4. Kelompok hasil (*outcome*): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*); sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negative.
6. Kelompok dampak (*impact*); pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.1.5 Keuntungan Pengukuran Kinerja

Menurut Arinda (2021), Keuntungan pengukuran kinerja yaitu :

1. Pengukuran kinerja memberikan mekanisme pelaporan program kinerja pada manajemen yang lebih tinggi. Pengukuran kinerja memfokuskan pada perhatian tentang apa yang harus diselesaikan dan mengarahkan organisasi untuk berkonsentrasi pada waktu, sumber daya dan energi dalam mencapai sasaran. Jika hasilnya berbeda dengan sasaran organisasi dapat melakukan analisis kesenjangan kinerja dan membuat penyesuaiannya.
2. Pengukuran kinerja akan meningkatkan komunikasi internal antara staf dan pegawai, sebagaimana secara eksternal antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Penekanan dalam pengukuran dan peningkatan kinerja akan menciptakan iklim baru yang mempengaruhi semua pihak dalam memandang organisasi.
3. Organisasi perguruan tinggi yang berorientasi pada hasil membutuhkan informasi yang akurat dalam program dan layanan

pendukung baik di fakultas, program studi, maupun lembaga dan biro yang berperan serta memberikan layanan akademik yang berkualitas.

Pengumpulan dan pengolahan informasi yang akurat tergantung pada keefektifan komunikasi aktivitas kritis pada pencapaian misi.

4. Pengukuran kinerja menunjukkan atau mendemonstrasikan akuntabilitas perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga Pemangku kepentingan lain.
5. Pengukuran kinerja dapat menurunkan emosi dan mendorong pemecahan masalah secara konstruktif. Pengukuran memberikan data konkrit yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan baik, tidak hanya berdasar Intuisi saja.
6. Pengukuran kinerja meningkatkan pengaruh suatu hal dengan pengukuran dapat diidentifikasi wilayah wilayah membutuhkan perhatian dan memungkinkan pengaruh positif pada wilayah tersebut.
7. Perbaikan tidak akan mungkin dilakukan tanpa pengukuran kinerja. Jika organisasi tidak mengetahui posisi saat ini, maka tidak mungkin dapat ditentukan akan berada di mana, dan akan menjadi seperti apa. Organisasi butuh peta untuk dapat menentukan orientasi ke depan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari pengukuran kinerja adalah memberikan pendekatan terstruktur dan fokus pada perencanaan strategis, tujuan, dan kinerja yang akan dicapai oleh instansi atau organisasi sektor publik.

2.1.6 Satuan dan Kriteria Unit Kerja

Menurut Arinda (2021) Pengukuran kinerja yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk mengetahui seberapa baik organisasi berjalan

1. Apakah organisasi telah mencapai tujuan
2. Apakah para pengguna layanan perguruan tinggi merasa puas
3. Apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Apakah ada perbaikan dalam sistem perguruan tinggi dan dimana.

Pengukuran kinerja memberikan pada manajemen informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan yang cerdas tentang apa yang perguruan tinggi lakukan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan gabungan dari angka dan satuan. Angka memberikan gambaran seberapa besar dan satuan memberikan makna atas angka tersebut. Ukuran kinerja ini selalu dan harus dikaitkan dengan tujuan atau sasaran atau target tertentu.

2.1.7 Pengertian Indikator Kinerja

Menurut Yanti (2021) indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak(*impacts*). Menurut Mahmudi (2015) mengatakan bahwa indikator kinerja yang dikembangkan harus memiliki karakteristik yaitu sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur dengan standar atau target kinerja. Dapat disimpulkan

bahwa indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.1.8 Peran Indikator Kinerja Bagi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa peran indikator yang digunakan dalam pemerintah yaitu membantu organisasi untuk mengevaluasi aktivitas dan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran indikator kinerja bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja
- f. Untuk menunjukkan efektivitas
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.1.9 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Menurut Basri (2018), Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Organisasi sektor publik bisa tidak lepas dari pemerintahan maka organisasi sektor publik identik dengan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi pelayanan publik yang melayani kepentingan umum dengan cakupan masyarakat luas. Organisasi sektor publik tentunya akan selalu berkaitan dengan pemerintah.

2.1.10 Pengertian *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2015) *value for money* adalah konsep paling penting dalam organisasi sektor publik. Untuk meningkatkan kinerja secara sektor publik diperlukan manajemen kinerja yang berorientasi pada *value for money*. Pengertian *value for money* menurut Mardiasmo (2018) adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

a. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input di mana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Pengertian ekonomi menurut Mardiasmo (2018) adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Pengertian efisiensi menurut Mardiasmo (2018) merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

c. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2018) adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa ekonomis membahas mengenai input, efektivitas membahas mengenai output, dan efisiensi membahas mengenai input dan output. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya

2.1.11 Implementasi Konsep *Value For Money*

Menurut Putri (2020) *value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value*

for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Implementasi konsep *value for money* ini diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Dalam Mardiasmo (2018) Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah untuk membantu satu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai anggaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

2.1.12 Indikator *Value For Money*

Menurut Triniyati (2018) peranan indikator kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan dalam penyediaan dan alokasi sumber daya, efisien yang penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berhasil guna dalam

arti pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator *value for money* terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel yang berisi penelitian terdahulu mengenai *value for money*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arinda (2021)	Analisis <i>Value For Money</i> pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Kualitatif	Analisis <i>Value For Money</i> pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tahun 2018-2019 ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif.
2	Putri (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif	Analisis <i>value for money</i> pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur sudah ekonomis, efektif, belum efisien.

Tabel 2.1
(Lanjutan)

3	Enre (2020)	Analisis <i>Value For Money</i> pada Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (periode 2014-2018)	Deskriptif	Kinerja pemerintah daerah kabupaten kota medan selama tahun 2014-2018 belum ekonomis, efisien dan cukup efektif.
4	Dwinanda (2018)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Deskriptif Komparatif	Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari 2013-2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien, dan kurang efektif.
5	Laila Intan Syifa Nasri (2018)	Analisis <i>Value For Money</i> Anggaran Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis Pemerintahan Kota Medan mengalami Penurunan, Rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami peningkatan

Hasil penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam menyusun kerangka yang berkaitan dengan informasi yang ada dalam penulisan ini.

2.1.14 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran





2.2 Hipotesis

Berdasarkan Telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu: Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas tetapi dapat langsung memasuki objek yang masih bersifat umum dan hasil akhir dari kualitatif akan menghasilkan informasi-informasi yang bermakna dan bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, sehingga hipotesis atau ilmu yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengatasi masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini menggunakan metode tersebut karena bermaksud untuk membandingkan apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melaksanakan rencana kerjanya dengan baik atau tidak dengan perhitungan pengukuran *value for money* yaitu dengan menggunakan elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Jalan. Jend. Sudirman, No. 468, Pekanbaru, 28126, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28121.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 Value For Money

Value for money adalah metode yang berfungsi untuk menilai atau mengukur sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan tiga elemen dalam *value for money* yaitu Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi.

Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan metode *value for money* adalah :

1. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat ekonomis adalah :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Anggaran input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Nilai input : Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Menurut Mahsun (2013), dalam kriteria ekonomis adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis

2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Persentase capaian fisik dari program

Angka output yang dimaksud adalah persentase capaian fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Input : Persentase keuangan program

Angka input yang dimaksud adalah persentase keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Menurut Mahsun (2013) kriteria efisiensi adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien.

3. Efektivitas

Efektivitas (berhasil tercapai) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target

yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah rencana output dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Menurut Mahsun (2013) dalam kriteria efektivitas adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat Efektif.

3.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran tolak ukur yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar, dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data target realisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data-data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dan tidak dipublikasikan ke khalayak umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku-buku, atau sumber data tertulis lainnya baik berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun anggaran 2019 dan 2020.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Sub Program dan Perencanaan dan Kepala Bagian Sub Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *value for money* dengan melihat 3 elemen, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dari pengukuran elemen ini, kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah baik atau belum. Data-data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun anggaran 2019 dan 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terletak di Jalan. Jend. Sudirman, No. 468, Pekanbaru, 28126, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28121.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki visi, yaitu "Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia" (Riau Bersatu). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau juga memiliki 5 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas udara.
4. Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah.
5. Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan.

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sesuai pasal 3 ayat 2, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyelenggarakan 5 fungsi, yaitu :

1. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim,

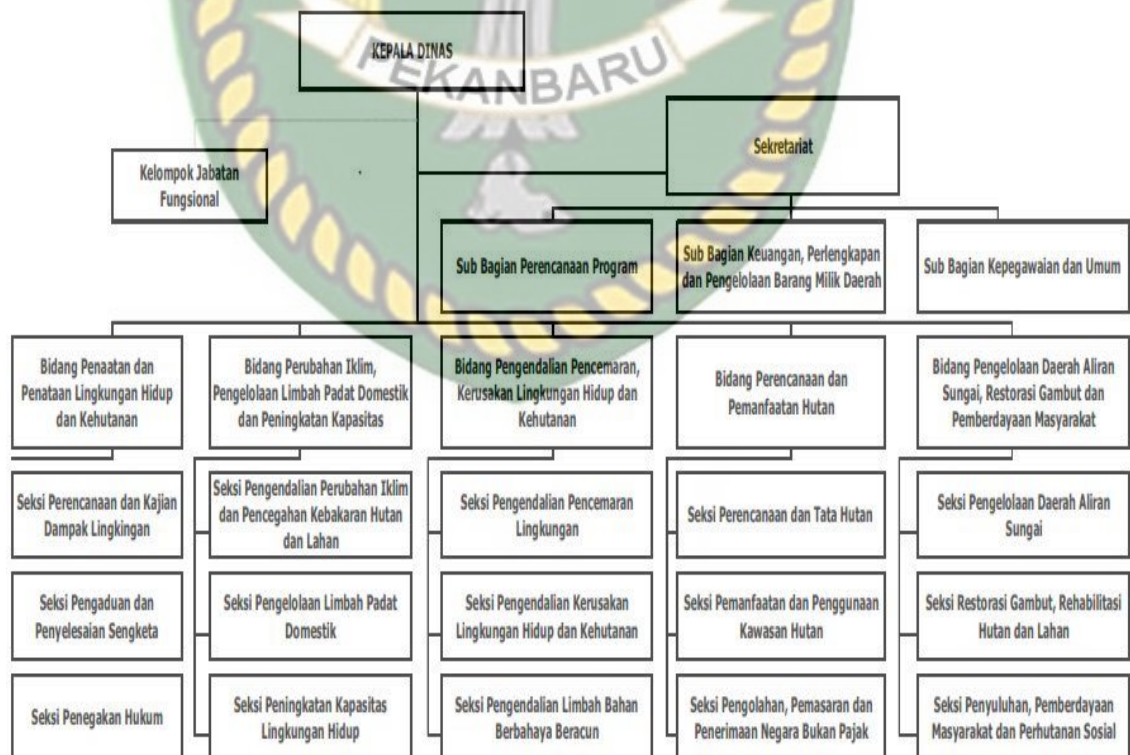
Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016



4.2 Hasil Perhitungan *Value For Money* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki program - program setiap tahunnya. Pada setiap program, terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Setiap program membutuhkan anggaran agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap pertanggungjawaban kegiatan ditulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Di dalam LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, terdapat 13 Program yang dijalankan pada tahun 2019. Berikut merupakan nama program dengan kegiatannya masing – masing.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Adminisefektitrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Tabel 4.1
(Lanjutan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan SKPD - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Model MINAS TAHURA - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Laboratorium Lingkungan - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Bengkalis Pulau - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Mandau - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Rokan - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPH. Kampar Kiri - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Sorek - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Tebing Tinggi - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Mandah - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Indragiri - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Singingi - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Tasik Besar Serkap - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Bagan Siapi – Api - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Suligi Batu Gajah
--	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Riau
Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - Penyediaan Sarana Kearsipan - Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pemantapan SDM Perencanaan Dinas Lingkungan dan Kehutanan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Riau - Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan - Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau - Pengolahan Data Anggaran Bersumber APBD dan APBN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau - Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo - Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup - Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL - Penyusunan Profil Emisi GRK Provinsi Riau - Pengawasan Izin Lingkungan - Asistensi KLHS Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung

Tabel 4.1
(Lanjutan)

		<p>Iklm Provinsi Riau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK) - Penyusunan Master Plan UPT. Laboratorium Lingkungan
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut - Pengembangan Kearifan Lokal - Pengembangan Taman Kehati
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Buku Statistik Lingkungan Hidup Daerah - Pembinaan Pengelolaan Persampahan
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan - Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Riau - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR - Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT. KPH Rokan - Pembuatan Tanaman Reboisasi Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan - Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura - Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau - Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Di Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap - Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/Hak/Desa - Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal UPT. KPH Bagan Siap – Api - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Dalam Areal

Tabel 4.1
(Lanjutan)

		<ul style="list-style-type: none"> - UPT. KPH Bengkalís - Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Kampar Kiri - Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Sorek - Perlindungan Hutan dan Partisipasif Masyarakat Di Wilayah UPT. KPH Mandah - Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan UPT. KPH Indragiri - Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Di UPT. KPH Singingi - Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Mandau - Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan - Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Pendampingan Masyarakat Peduli Api - Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di UPT. KPH Tebing Tinggi - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di UPT. KPH Bengkalís Pulau - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di UPT. KPH Bagan Siapi – Api - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di UPT. KPH Suligi Batu Gajah - Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT. KPH Rokan
11	Program Pembinaan dan Pengertian Industri Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL) - Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan

Tabel 4.1
(Lanjutan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Kampar Kiri - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Sorek - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Mandah - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Laboratorium Lingkungan - Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. Bagan Siapi – Api (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Bengkalis Pulau (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Mandau (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Rokan (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Suligi Batu Gajah (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Sorek (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Mandah (DAK) - Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT. KPH Indragiri (DAK)
13	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Hutan - Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat - Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT. KPH Rokan (DAK) - Pengembangan Budidaya Lebah Madu Pada 1 KTH (DAK) - Pengembangan Budidaya Lebah Madu UPT. KPH Tasik Besar Serkap (DAK) - Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT. KPH Tebing Tinggi (DAK)

Sumber : LKJIP Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 30 kegiatan, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 5 kegiatan, program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki 1 kegiatan, program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 2 kegiatan, program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki 7 kegiatan, program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup memiliki 13 kegiatan, program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam memiliki 3 kegiatan, program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup memiliki 3 kegiatan, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki 6 kegiatan, program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan memiliki 24 kegiatan, program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan memiliki 1 kegiatan, program Perencanaan dan Pengembangan Hutan memiliki 15 kegiatan, program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan memiliki 7 kegiatan.

Pada tahun 2020, terdapat 5 program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Berikut merupakan nama program beserta kegiatan

Tabel 4.2

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tabel 4.2
(Lanjutan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Makan dan Minuman - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - Pengelolaan Barang Milik Daerah (OPD)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih - Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau - Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup - Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL - Pengawasan Izin Lingkungan - Asistensi KLHS Kabupaten/Kota - Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Penyusunan DED dan Izin Lingkungan - Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan - Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan - Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup - Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) - Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pengembangan Kearifan Lokal - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem - Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau - Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan

Tabel 4.2
(Lanjutan)

		<p>Program Riau Hijau Di Provinsi Riau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Laboratorium Lingkungan - Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penyusunan Profil Emisi GRK Provinsi Riau - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat - Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RHPD Pada Perizinan Perhutanan Sosial - Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/HKM/Desa - Penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Wilayah UPT. KPH Rokan - Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai Bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap - Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana Prasarana Wisata Tahura SSH - Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT. KPH Suligi Batu Gajah - Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau - Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Persembahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPHP Minas Tahura - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Perbenihan Tanaman Hutan - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tabel 4.2
(Lanjutan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Teknis Lainnya UPT. KPH Bengkalis Pulau - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Mandau - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Rokan - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Kampar Kiri - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Sorek - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Tebing Tinggi - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Mandah - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Indragiri - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Singingi - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Tasik Besar Serkap - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Bagan Siapi – Api - Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Suligi Batu Gajah - Rekonsiliasi PNBK Sektor Kehutanan - Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serbaguna (MPTS) Di Kawasan Areal Masyarakat Hutan Adat - Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian - Pengembangan Data dan Informasi Daerah Aliran Sungai - Penanganan Dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau - Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau - Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat - Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Tabel 4.2
(Lanjutan)

		<p>Hutan dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Suligi – Batu Gajah - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Tasik Besar Serkap - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Bagan Siapi – Api - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Bengkalis Pulau - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Mandau - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Rokan - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Minas TAHURA - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Kampar Kiri - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Sorek - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Tebing Tinggi - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Mandah - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Indragiri - Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPHP Singingi - Rehabilitasi Mangrove (DAK)
--	--	---

Sumber : LKJIP Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 12 kegiatan, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 3 kegiatan, program Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup memiliki 25 kegiatan, program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan memiliki 27

kegiatan, program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki 25 kegiatan.

Terdapat 3 elemen utama dalam perhitungan *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2018) cara mengukur tingkat ekonomis yaitu :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Dimana input merupakan realisasi anggaran dan nilai input merupakan anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.231.000	13.550.000	75,51%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, SDAL	963.465.775	1.523.965.000	63,21%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	403.739.600	410.326.500	98,39%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	168.000.000	198.000.000	84,85%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	531.130.000	536.840.000	98,94%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	85.562.400	86.465.000	98,96%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.929.215	39.956.000	99,93%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	27.920.000	27.920.000	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PERPU	26.867.700	31.185.500	86,15%
		Penyediaan Makanan dan Minum	35.970.912	114.750.000	31,35%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	518.824.682	533.997.839	97,16
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	472.768.000	472.800.000	99,99%
		Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan SKPD	38.468.400	55.194.900	69,76%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Model Minas Tahura	95.692.800	95.692.800	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTLUPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	158.768.400	160.675.140	98,91%
		Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan	164.664.950	201.027.450	81,91%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	152.610.505	157.173.700	97,10%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Lingkungan	132.117.790	149.638.395	88,29%
		Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	173.013.085	261.523.600	66,16%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Mandau	120.593.850	138.598.150	87,01%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Rokan	167.875.194	203.919.900	82,32%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Kampar Kiri	137.634.500	151.000.300	91,15%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Sorek	73.228.100	97.890.000	74,81%
		Peningkatan Manajemen UPT. KPH Tebing Tinggi	255.814.250	369.183.385	69,29%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandah	196.497.310	215.363.035	91,24%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Indragiri	145.388.794	163.332.200	89,01%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Kuantan Singingi	115.661.081	155.036.000	74,60%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Tasik Besar Serkap	170.489.024	205.196.280	83,09%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPH Bagan Siapi-Api	283.863.785	294.496.000	81,11%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Suligi Batu Gajah	258.300.312	269.024.200	96,01%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	47.876.439	100.000.000	47,88%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	18.914.300	100.000.000	18,91%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung dan Kantor	75.098.000	90.200.000	83,26%
		Penyediaan Sarana dan Kearsipan	30.001.500	40.000.000	75,00%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	118.377.600	127.135.000	93,11%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental	199.700.000	251.400.000	79,44%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.343.000	109.857.000	82,24%
		Pemantapan SDM Perencanaan Dinas LHK	121.453.450	130.668.030	92,95%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	22.676.300	49.820.000	45,52%
		Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Sensus Barang Milik Pemprov. Riau	117.753.000	128.459.550	91,67%
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan	126.328.000	135.187.900	93,45%
		Penyusunan RENSTRA SKPD	19.815.000	49.415.000	40,10%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD	103.516.000	103.524.300	99,99%
		Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74.022.600	80.687.750	91,74%
		Pengelolaan Data Anggaran Bersumber APBD dan APBN Dinas LHK Prov. Riau	464.397.110	486.986.160	95,36%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	99.463.700	105.576.000	94,21%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	545.705.900	683.734.930	79,81%
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	60.993.592	115.951.420	52,60%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	65.083.100	65.973.700	98,65%
		Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo	193.959.400	197.894.800	98,01%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	261.904.546	265.204.785	98,76%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	109.690.850	128.632.850	85,27%
		Penyusunan Profil Emisi GRK	132.240.100	142.795.680	92,61%
		Pengawasan Izin Lingkungan	185.797.393	343.452.069	54,10%
		Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	286.365.218	303.287.100	94,42%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	87.186.900	95.881.300	90,93%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK)	0	588.515.600	0%
Penyusunan Master Plan UPT Laboratorium Lingkungan	43.260.350	199.283.130	21,71%		

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	289.926.740	344.314.400	84,20%
		Pengembangan Kearifan Lokal	71.121.200	73.607.600	96,62%
		Pengembangan Taman Kehati	66.458.200	70.622.950	94,10%
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	98.987.800	110.017.800	89,97%
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Statistik	83.037.378	96.521.888	86,03%
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan	271.266.000	280.340.300	96,76%
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembibitan Tanaman Hutan untuk Masyarakat	1.809.284.927	1.951.054.850	92,73%
		Rehabilitasi Hutan Mangrove di Provinsi Riau	332.646.400	358.521.500	92,78%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	482.922.300	553.708.400	87,22%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	281.287.400	289.168.200	97,27%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan	0	252.950.061	0%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII	0	252.950.061	0%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penanganan dan Penyelesaian Perkara/ Tindak Pidana Kehutanan	2.836.870.887	6.210.000.000	38,44%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura	240.696.206	257.132.750	93,61%
		Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	126.577.900	143.136.000	88,43%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam di Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap	118.535.400	140.137.000	84,59%
		Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/Hak/Desa	242.656.230	451.617.100	53,73%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal UPT KPH Bagan Siapi – Api	117.902.050	175.567.000	67,16%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Bengkalis	129.652.500	190.864.800	67,93%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Kampar Kiri	162.659.510	170.714.750	95,28%
		PPP UPT KPH Sorek	179.878.000	210.777.000	85,34%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Perlindungan hutan dan Partisipasif Masyarakat di Wilayah UPT KPH Mandah	224.370.021	256.488.907	87,48%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan Kawasan Hutan UPT KPH Indragiri	150.145.929	168.877.700	88,91%
		Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di UPT KPH Singingi	162.381.028	230.267.800	70,52%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Mandau	171.860.850	243.048.750	70,71%
		Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	255.566.400	257.227.400	99,35%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	492.569.700	557.747.200	88,31%
		Pendampingan Masyarakat Peduli Api	210.179.400	229.416.000	91,61%
		Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	416.212.300	456.623.700	91,55%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Tebing Tinggi	237.189.600	257.726.700	92,03%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Patroli Pencegahan dan PKHL di UPT KPH Bengkalis P.	209.861.323	272.570.800	76,99%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Bagan Siapi – Api	208.930.500	260.359.600	80,25%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	347.532.720	356.634.100	97,45%
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan	451.772.250	589.727.770	76,61%
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Rokan	101.203.300	124.826.580	81,08%
11	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dan (DBH) Daerah	175.131.454	207.501.335	84,40%
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan	107.336.202	121.752.510	88,16%
		Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan	64.842.000	4.445.159.100	1,46%
		Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	103.728.000	105.802.600	98,04%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Kampar Kiri	96.604.200	100.000.000	96,60%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Sorek	91.127.300	100.000.000	91,13%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Mandah	48.620.500	50.025.000	97,19%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Lab. Lingkungan	78.754.190	81.293.700	96,88%
		Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bagan Siapi – Api (DAK)	31.669.025	39.740.189	79,69%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bengkalis	31.669.025	39.740.189	79,69%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandau	31.669.025	39.740.189	79,69%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Rokan (DAK)	35.805.000	39.690.183	90,21%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Suligi (DAK)	31.669.025	39.740.189	79,69%

Tabel 4.3
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Sorek (DAK)	31.669.025	39.740.189	79,69%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandah	31.669.025	39.740.189	79,69%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Indragiri	35.805.000	39.740.189	90,10%
13	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan	293.922.500	302.654.700	97,11%
		Monitoring dan Pelaksanaan (TJSP) BUBK dan Pemberdayaan	132.453.200	140.948.000	93,97%
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat	365.433.190	383.426.800	95,31%
		Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan	0	50.000.000	0%
		Pengembangan BLM Pada 1 KTH	49.348.500	50.000.000	98,70%
		Pengembangan BLM Pada UPT KPH Tasik Besar	48.875.000	50.000.000	97,75%
		Pengadaan Sarana Produksi GS Pada UPT Tebing Tinggi	0	50.000.000	0,00%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.3, hasil perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melaksanakan 117 kegiatan yang telah dijalankan, dengan perhitungan terkecil sebesar 0% dan perhitungan terbesar sebesar 100%. terdapat 115 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 2 kegiatan nilai ekonomis 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada tahun 2020. Berikut perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.225.000	8.250.000	99,70%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.019.256.264	1.054.000.000	96,70%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.181.800	407.055.300	99,29%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	520.019.500	527.109.500	98,65%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	128.315.055	128.772.400	99,64%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.510.500	67.711.200	99,70%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.975.000	15.000.000	99,83%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	89.950.500	209.740.000	42,89%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	650.738.315	759.885.000	85,64%
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	878.521.400	934.860.200	93,97%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	502.297.300	502.350.000	99,99%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	254.275.000	266.956.000	95,25%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	82.018.385	85.400.000	96,04%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	55.214.138	58.500.000	94,38%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	79.506.000	83.725.000	94,96%
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	860.000	860.000	100%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	336.531.520	462.624.000	72,74%
		Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	720.000	720.000	100%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik	93.865.800	108.464.000	86,54%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	100.513.384	101.871.000	98,67%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	62.630.600	133.503.340	46,91%
		Pengawas Izin Lingkungan	104.425.700	104.473.200	99,95%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Asistensi KLHS Kab/Kota	222.183.482	368.839.500	60,24%
		Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	46.843.044	96.144.000	48,72%
		Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium UPT	114.460.600	216.342.000	52,91%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Lab. Lingkungan	110.855.000	111.762.200	99,19%
		Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	68.161.500	75.729.200	90,01%
		Penyusunan (RPPLH)	326.366.736	454.696.200	71,78%
		Penyusunan Dokumen (IKPLHD)	129.840.100	200.216.200	64,85%
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	161.892.200	188.015.000	86,11%
		Pengembangan Kearifan Lokal	92.187.300	112.745.400	81,77%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	59.519.050	61.354.000	97,01%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	85.269.200	98.800.000	86,30%
		Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau	640.873.380	761.121.000	84,20%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang	16.888.000	19.908.000	84,83%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	4.200.000	4.200.000	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab. Lingkungan	133.413.846	147.506.000	90,45%
		Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	169.959.800	181.425.476	93,68%
		Penyusunan Profil Emisi (GRK)	106.507.600	128.161.000	83,10%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan (LH)	40.104.300	408.800,000	9,81%
4	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan (TJSP) (BUBK) dan (PM)	65.915.000	82.130.000	80,26%
		Asistensi Pengendalian RKU	43.410.000	51.250.000	84,70%
		Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/HKM/Desa	72.803.000	102.800.000	70,82%
		Penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Wilayah UPT KPH Rokan	204.879.736	207.023.000	98,96%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai Bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap	894.985.800	901.660.000	99,26%
		Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Tahura SSH	372.926.000	374.000.000	99,71%
		Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di UPT KPH Suligi Batu Gajah	216.498.320	222.654.000	97,24%
		Pengembangan Perhutanan Sosial	100.354.675	124.545.000	80,58%
		Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	35.973.000	58.874.300	61,10%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Minas Tahura	537.830.948	557.340.000	96,50%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT PKPM	312.693.067	313.621.429	99,70%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT Perbenihan Tanaman Hijau	154.775.940	159.169.958	97,24%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bengkalis Pulau	233.477.382	259.474.174	89,98%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Mandau	162.196.810	220.986.122	73,40%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Rokan	178.267.004	181.606.000	98,16%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Kampar Kiri	167.402.400	174.966.000	95,66%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Sorek	92.577.000	117.800.000	78,59%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Tebing Tinggi	208.144.910	243.410.000	85,51%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Mandah	181.460.125	216.503.475	83,81%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Indragiri	189.467.420	211.058.872	89,77%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Singingi	182.346.460	213.181.000	85,54%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH Tasik	247.433.103	260.950.000	94,82%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bagan Siapi – Api	205.942.912	217.929.500	94,50%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Suligi Batu Gajah	216.433.020	216.437.900	99,99%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Rekonsiliasi PNPB Sektor Kehutanan	182.098.826	238.000.800	76,51%
		Pengembangan Perbenihan	149.550.000	149.890.000	99,77%
		Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	118.584.400	118.584.400	100%
5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serbaguna (MPTS)	22.236.400	122.785.000	18,11%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	63.360.000	63.360.000	100%
		Pengembangan Data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	97.085.000	102.320.000	94,88%
		Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan	280.158.826	299.409.250	93,57%
		Pembinaan, Pengawasan dan PKS Dana DBH-DR	75.949.500	81.178.000	93,56%
		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1.198.734.870	2.750.418.000	43,58%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau	126.107.000	152.310.000	82,80%
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	99.884.500	99.962.000	99,92%
		Perlindungan dan Penanganan Hutan	162.512.452	176.540.000	92,05%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	596.132.100	741.750.000	80,37%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.742.300	6.332.577.700	0,04%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi Batu Gajah	219.310.000	225.000.000	97,47%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar	130.630.540	131.558.475	99,29%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi – Api	216.357.700	235.000.000	92,07%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	231.821.312	235.100.000	98,61%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandah	136.374.035	235.200.000	57,98%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	115.996.500	131.558.475	88,17%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan K. UPT KPHP Minas Tahura	120.687.475	131.558.475	91,74%

Tabel 4.4
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Ekonomis
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Kampar Kiri	117.450.000	131.558.475	89,28%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Sorek	134.377.000	201.558.475	66,67%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Tebing Tinggi	227.540.000	236.200.000	96,33%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Mandah	207.162.800	235.020.000	88,15%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Indragiri	153.124.600	235.000.000	65,16%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Singingi	136.915.730	165.791.083	82,58%
		Rehabilitasi Mangrove (DAK)	22.077.650	22.077.650	100%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.4, hasil perhitungan ekonomis kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melaksanakan 92 kegiatan yang telah dijalankan, dengan perhitungan ekonomis terkecil sebesar 0,04% dan

perhitungan terbesar sebesar 100%. terdapat 86 kegiatan dengan nilai ekonomis dibawah 100% dan terdapat 6 kegiatan nilai ekonomis 100%.

2. Efisiensi

Elemen *value for money* kedua adalah efisiensi, menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Dimana *output* merupakan persentase capaian fisik kegiatan dan *input* merupakan persentase capaian keuangan yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efisiensi pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	75,51%	132,43%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, SDAL	99,87%	63,21%	157.99%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98.39%	101.63%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	84,85%	117,85%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,15%	98,94%	100,21%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	98,96%	101,05%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	99,93%	100,07%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PERPU	100%	86,15%	116,08%
		Penyediaan Makanan dan Minum	100%	31,35%	38,98%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	97,6%	102,92%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100%	99,99%	100,01%
		Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan SKPD	100%	69,76%	143,35%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Model Minas Tahura	100%	100%	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTLUPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	98,91%	101,10%
		Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan	100%	81,91%	122,08%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	100%	97,10%	102,99%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Lingkungan	91,27%	88,29%	103,37%
		Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	68,57%	66,16%	103,64%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Mandau	96,25%	87,01%	110,61%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Rokan	86,29%	82,32%	104,82%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Kampar Kiri	100%	91,15%	109,70%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Sorek	86,68%	74,81%	115,87%
		Peningkatan Manajemen UPT. KPH Tebing Tinggi	73,73%	69,29%	106,40%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandah	99,15%	91,24%	108,67%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Indragiri	99,15%	89,01%	111,39%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Kuantan Singingi	84,03%	74,60%	112,64%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Tasik Besar Serkap	100%	83,09%	120,35%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPH Bagan Siapi-Api	98,35%	81,11%	121,25%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Suligi Batu Gajah	100%	96,01%	104,15%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	69,60%	47,88%	145,36%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20,17%	18,91%	106,66%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung dan Kantor	90%	83,26%	108,09%
		Penyediaan Sarana dan Kearsipan	100%	75%	133,33%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,15%	93,11%	106,48%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental	100%	79,44%	125,88%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	82,24%	121,59%
		Pemantapan SDM Perencanaan Dinas LHK	100%	92,95%	107,58%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	100%	45,52%	219,68%
		Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Sensus Barang Milik Pemprov. Riau	92,76%	91,67%	101,18%
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan	95,94%	93,45%	102,66%
		Penyusunan RENSTRA SKPD	100%	40,10%	249,37%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD	100%	99,99%	100,01%
		Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100%	91,74%	109,03%
		Pengelolaan Data Anggaran Bersumber APBD dan APBN Dinas LHK Prov. Riau	95,67%	95,36%	100,32%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100%	94,21%	106,14%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	88,66%	79,81%	111,08%
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	69,60%	52,60%	132.31%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	100%	98,65%	101,36%
		Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo	100%	98,01%	102,03%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	100%	98,76%	101,25%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	86,21%	85,27%	101,10%
		Penyusunan Profil Emisi GRK	100%	92,61%	107,97%
		Pengawasan Izin Lingkungan	55,09%	54,10%	101,82%
		Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	96,05%	94,42%	101,72%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	100%	90,93%	109,97%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK)	0%	0%	0%
		Penyusunan Master Plan UPT Laboratorium Lingkungan	27,34%	21,71%	125.93%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	85,36%	84,20%	101,37%
		Pengembangan Kearifan Lokal	100%	96,62%	103,49%
		Pengembangan Taman Kehati	100%	94,10%	106,26%
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	100%	89,97%	111,14%
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Statistik	86,68%	86,03%	100,75%
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan	100%	96,76%	103,34%
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan	99,53%	92,73%	107,33%
		Rehabilitasi Hutan Mangrove di Provinsi Riau	100%	92,78%	107,78%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	96,57%	87,22%	110,72%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	100%	97,27%	102,81%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan	0%	0%	0%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII	0%	0%	0%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penanganan dan Penyelesaian Perkara/ Tindak Pidana Kehutanan	79,12%	38,44%	205,82%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura	100%	93,61%	106,82%
		Aksi Serentak Menanam Pohon dan PKA Provinsi Riau	100%	88,43%	113,08%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam di Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap	85,00%	84,59%	100,48%
		Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/Hak/Desa	60,56%	53,73%	112,71%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal UPT KPH Bagan Siapi – Api	97,61%	67,16%	144,66%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Bengkalis	68,91%	67,93%	101,44%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Kampar Kiri	100%	95,28%	104,95%
		PPP UPT KPH Sorek	90,64%	85,34%	106,21%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Perlindungan hutan dan Partisipasif Masyarakat di Wilayah UPT KPH Mandah	89,49%	87,48%	102,29%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan Kawasan Hutan UPT KPH Indragiri	95,88%	88,91%	107,84%
		Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di UPT KPH Singingi	70,71%	70,52%	100,27%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Mandau	93,05%	70,71%	131,59%
		Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	99,89%	99,35%	100,50%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0%	0%	0%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	88,31%	113,24%
		Pendampingan Masyarakat Peduli Api	100%	91,61%	109,15%
		Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	91,55%	109,23%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Tebing Tinggi	100%	92,03%	108,66%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Patroli Pencegahan dan PKHL di UPT KPH Bengkalis P.	89,97%	76,99%	115,56%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Bagan Siapi – Api	88,95%	80,25%	100,84%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	100%	97,45%	102,62%
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan	100%	76,61%	130,53%
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Rokan	93,33%	81,08%	115,10%
11	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan dan (DBH) Daerah	97,62%	84,40%	115,66%
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan	100%	88,16%	113,43%
		Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan	1,63%	1,46%	111,64%
		Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Hutan	99,32%	98,04%	101,31%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (&)	Efisiensi
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Kampar Kiri	100%	96,60%	103,51%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Sorek	91,22%	91,13%	100,09%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Mandah	100%	97,19%	102,89%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Lab. Lingkungan	100%	96,88%	103,22%
		Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bagan Siapi – Api (DAK)	100%	79,69%	125,49%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bengkalis	100%	79,69%	125,49%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandau	100%	79,69%	125,49%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Rokan (DAK)	100%	90,21%	110,85%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Suligi (DAK)	100%	79,69%	125,49%

Tabel 4.5
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Sorek (DAK)	100%	79,69%	125,49%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandah	100%	79,69%	125,49%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Indragiri	100%	90,10%	110,99%
13	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan	99,89%	97,11%	102,86%
		Monitoring dan Pelaksanaan (TJSP) BUBK dan Pemberdayaan	98,01%	93,97%	104,29%
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat	100%	95,31%	104,92%
		Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan	0%	0%	0%
		Pengembangan BLM Pada 1 KTH	100%	98,70%	101,31%
		Pengembangan BLM Pada UPT KPH Tasik Besar	100%	97,75%	102,30%
		Pengadaan Sarana Produksi GS Pada UPT Tebing Tinggi	0%	0%	0%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.5, terdapat 7 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase dibawah 100%, 2 kegiatan dengan nilai persentase efisiensi sebesar 100%, dan 108 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase lebih dari 100%

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada tahun 2020. Berikut perhitungan efisiensi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	99,70%	100,30%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	96,70%	103,41%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,29%	100,71%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	98,65%	101,36%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	99,64%	100,36%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,70%	100,30%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	100%	99,83%	100,17%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	42,89%	233,15%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	85,64%	116,76%
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	100%	93,97%	106,41%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100%	99,99%	100,01%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100%	95,25%	104,98%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan	96,68%	96,04%	100,85%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	98,41%	94,38%	104,26%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	95%	94,96%	100,04%
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100%	100%	100%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	100%	72,74%	137,47%
		Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	100%	100%	100%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik	99,93%	86,54%	115,47%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	100%	98,67%	101,34%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	74,72%	46,91%	159,28%
		Pengawas Izin Lingkungan	100%	99,95%	100,05%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Asistensi KLHS Kab/Kota	80,59%	60,24%	133,78%
		Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	73,17%	48,72%	150,18%
		Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium UPT	56,36%	52,91%	106,52%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Lab. Lingkungan	100%	99,19%	100,81%
		Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	100%	90,01%	110,87%
		Penyusunan (RPPLH)	89,32%	71,78%	124,43%
		Penyusunan Dokumen (IKPLHD)	86,50%	64,85%	133,38%
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	95,68%	86,11%	111,11%
		Pengembangan Kearifan Lokal	86,52%	81,77%	105,80%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	100%	97,01%	103,08%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	100%	86,30%	115,87%
		Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau	100%	84,20%	118,76%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan PKBTR	100%	84,83%	117,88%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	100%	100%	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab. Lingkungan	100%	90,45%	110,45%
		Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,89%	93,68%	106,62%
		Penyusunan Profil Emisi (GRK)	100%	83,10%	120,33%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan (LH)	15,27%	9,81%	155,65%
4	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan (TJSP) (BUBK) dan (PM)	99,16%	80,26%	123,54%
		Asistensi Pengendalian RKU	84,70%	84,70%	100%
		Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/HKM/Desa	84,96%	70,82%	119,96%
		Penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Wilayah UPT KPH Rokan	100%	98,96%	101,05%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai Bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap	99,79%	99,26%	100,03%
		Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Tahura SSH	100%	99,71%	100,29%
		Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di UPT KPH Suligi Batu Gajah	100%	97,24%	102,83%
		Pengembangan Perhutanan Sosial	100%	80,58%	124,10%
		Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	81,63%	61,10%	133,60%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Minas Tahura	100%	96,50%	103,62%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT PKPM	100%	99,70%	100,30%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT Perbenihan Tanaman Hutan	100%	97,24%	102,83%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bengkalis Pulau	95,38%	89,98%	106%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Mandau	84,99%	73,40%	115,79%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Rokan	100%	98,16%	101,87%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Kampar Kiri	100%	95,66%	104,53%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Sorek	98,30%	78,59%	125,07%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Tebing Tinggi	85,66	85,51%	100,17%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Mandah	91,75%	83,81%	109,47%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Indragiri	98,84%	89,77%	110,21%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Singingi	100%	85,54%	116,90%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH Tasik	97,08%	94,82%	102,38%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bagan Siapi – Api	100%	94,50%	105,82%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Suligi Batu Gajah	100%	99,99%	100,01%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Rekonsiliasi PNBK Sektor Kehutanan	96,38%	76,51%	125,97%
		Pengembangan Perbenihan	100%	99,77%	100,23%
		Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100%	100%	100%
5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serbaguna (MPTS)	24,38%	18,11%	134,62%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	100%	100%	100%
		Pengembangan Data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	98,71%	94,88%	104,03%
		Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan	94,83%	93,57%	101,34%
		Pembinaan, Pengawasan dan PKS Dana DBH-DR	100%	93,56%	106,88%
		Pencegahan dan PPKH dan Lahan	44,27%	43,58%	101,58%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau	100%	82,80%	120,77%
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	100%	99,92%	100,08%
		Perlindungan dan Penanganan Hutan	94,51%	92,05%	102,67%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	100%	80,37%	124,42%
		Pengembangan Sarana dan PPKH dan Lahan	0,06%	0,04%	150%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi Batu Gajah	100%	97,47%	102,59%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar	99,99%	99,29%	100,70%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi – Api	100%	92,07%	108,61%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	99,51%	98,61%	100,91%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau	61,86%	57,98%	106,69%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	100%	88,17%	113,41%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan K. UPT KPHP Minas Tahura	100%	91,74%	109%

Tabel 4.6
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Kampar Kiri	100%	89,28%	112%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Sorek	69,32%	66,67%	103,97%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Tebing Tinggi	100%	96,33%	103,80%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Mandah	88,48%	88,15%	100,37%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Indragiri	71,87%	65,16%	110,29%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Singingi	100%	82,58%	121,09%
		Rehabilitasi Mangrove (DAK)	0,00%	100%	0,00%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.6, terdapat 1 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase dibawah 100%, 6 kegiatan dengan nilai persentase efisiensi sebesar 100%, dan 85 kegiatan dengan nilai efisiensi persentase lebih dari 100%.

3. Efektivitas

Elemen *value for money* ketiga adalah efektivitas, menurut Mardiasmo (2018), cara mengukur tingkat efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

dimana *outcome* merupakan angka realisasi hasil/keluaran kegiatan dan *output* merupakan angka rencana hasil/keluaran yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019. Berikut merupakan perhitungan elemen efektivitas pada setiap program beserta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2019.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	714 Surat	1000 Surat	71,4%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63 Unit	63 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PERPU	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minum	2.967 Porsi	6.650 Porsi	44,62%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	118 Kali	60 Kali	196,67%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Model Minas Tahura	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTLUPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab Mandau	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Rokan	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Kampar Kiri	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Sorek	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Tebing Tinggi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandah	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Indragiri	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Kuantan Singingi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Tasik Besar Serkap	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPH Bagan Siapi-Api	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	22 Unit	22 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	10 Unit	70%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung dan Kantor	303 Servis	353 Servis	85,84%
		Penyediaan Sarana dan Kearsipan	7 Unit	9 Unit	77,77%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	125 Orang	300 Orang	41,67%
		Pemantapan SDM Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Sensus Barang Milik Pemprov. Riau	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Organisasi Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
		Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	90,91%
		Pengelolaan Data Anggaran Bersumber APBD dan APBN Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau	8 Jenis/Dokumen	8 Jenis/Dokumen	100%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	39 Kali	39 Kali	100%
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	6 Usaha	6 Usaha	100%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	2 Kali	2 Kali	100%
		Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo	2 Kali	2 Kali	100%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	44 Kasus	44 Kasus	100%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	9 Lokasi	9 Lokasi	100%
		Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pengawasan Izin Lingkungan	27 Usaha	38 Kegiatan	71,05%
		Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	7 Lokasi	7 Lokasi	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK)	0 Unit	1 Unit	0%
		Penyusunan Master Plan UPT Laboratorium Lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen	0%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Pengembangan Kearifan Lokal	5 Kabupaten	5 Kabupaten	100%
		Pengembangan Taman Kehati	7 Lokasi	7 Lokasi	100%
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Statistik	2 Buku	2 Buku	100%
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan	204.000 Batang	200.000 Batang	102%
		Rehabilitasi Hutan Mangrove di Provinsi Riau	111.600 Lokasi	125.000 Lokasi	89,28%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	1 Buku	1 Buku	100%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan	0 Ha	32 Ha	0%
		Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII	10 Kasus	12 Kasus	83,33%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penanganan dan Penyelesaian Perkara/ Tindak Pidana Kehutanan	10 Kasus	12 Kasus	83,33%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura	13 Kali	13 Kali	100%
		Aksi Serentak Menanam Pohon dan PKA Provinsi Riau	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam di Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap	3 Kali	3 Kali	100%
		Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/Hak/Desa	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal UPT KPH Bagan Siapi – Api	6 Kali Patroli	6 Kali Patroli	100%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Bengkalis	3 Lokasi Kelompok Masyarakat	10 Lokasi Kelompok Masyarakat	30%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Kampar Kiri	9 Kali Patroli	9 Kali Patroli	100%
		Pengawasan, Pengamanan UPT KPH Sorek	49 Kali Patroli	51 Kali Patroli	96,08%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Perlindungan hutan dan Partisipatif Masyarakat di Wilayah UPT KPH Mandah	15 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	75%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan Kawasan Hutan UPT KPH Indragiri	50 Kali Patroli	50 Kali Patroli	100%
		Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di UPT KPH Singingi	6 Kasus	6 Kasus	100%
		Pengawasan, Pengamanan, dan Perlindungan UPT KPH Mandau	20 Kali Patroli	20 Kali Patroli	100%
		Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Kali	11 Kali	72,72%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0 Jenis	10 Jenis	0%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	50 Kali	50 Kali	100%
		Pendampingan Masyarakat Peduli Api	11 Lokasi	11 Lokasi	100%
		Kampanye PKH dan Lahan	18 Lokasi	18 Lokasi	100%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Tebing Tinggi	62 Kali Patroli	62 Kali Patroli	100%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Patroli Pencegahan dan PKHL di UPT KPH Bengkalis Pulau.	41 Kali Patroli	72 Kali Patroli	56,94%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Bagan Siapi – Api	13 Kali Patroli	13 Kali Patroli	100%
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	76 Kali Patroli	76 Kali Patroli	100%
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan	3 Kali	3 Kali	100%
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Rokan	7 Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	100%
11	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan dan (DBH) Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan	6 Unit	6 Unit	100%
		Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan	1 Sistem	1 Sistem	100%
		Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Hutan	0	0	0%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Kampar Kiri	7 Jenis	7 Jenis	100%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT KPH Sorek	7 Jenis	8 Jenis	87,50%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Mandah	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Lab. Lingkungan	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bagan Siapi – Api (DAK)	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Bengkalis	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandau	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Rokan (DAK)	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Suligi (DAK)	1 Unit	1 Unit	100%

Tabel 4.7
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Sorek (DAK)	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Mandah	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/Tahura UPT KPH Indragiri	1 Unit	1 Unit	100%
13	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan	60 Orang	60 Orang	100%
		Monitoring dan Pelaksanaan (TJSP) BUBK dan Pemberdayaan	22 Unit	22 Unit	100%
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat	28 Kelompok Tani	28 Kelompok Tani	100%
		Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan	0 Unit	1 Unit	0%
		Pengembangan BLM Pada 1 KTH	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengembangan BLM Pada UPT KPH Tasik Besar	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Sarana Produksi GS Pada UPT Tebing Tinggi	0 Unit	1 Unit	0%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.7, terdapat 24 kegiatan dengan nilai persentase

efektivitas dibawah 100%, 91 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas sama dengan 100%, dan terdapat 2 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas lebih dari 100%.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektivitas pada kegiatan di tahun 2020. Berikut perhitungan efektivitas kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivitas
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Surat	200 Surat	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Jenis	36 Jenis	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	45 Jenis	45 Jenis	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 Jenis	18 Jenis	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	5.751 Porsi	9.000 Porsi	63,90%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	120 Kali	120 Kali	100%
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	36 OB	36 OB	100%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	17 OB	17 OB	100%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 OPD	100 OPD	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan	12 Unit	12 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Unit	12 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	216 Unit	216 Unit	100%
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	0 Segmen	0 Segmen	0%
		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	44 Kasus	44 Kasus	100%
		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	9 Lokasi	9 Lokasi	100%
		Pengawas Izin Lingkungan	13 Usaha/ Kegiatan	13 Usaha/ Kegiatan	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Asistensi KLHS Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%
		Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota	75%
		Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium UPT	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Lab. Lingkungan	6 Unit	6 Unit	100%
		Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	7 Kab/Kota	12 Kab/Kota	58,33%
		Penyusunan (RPPLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyusunan Dokumen (IKPLHD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4 Unit	4 Unit	100%
		Pengembangan Kearifan Lokal	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Prov. Riau	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan PKBTR	0 Ha	0 Ha	0%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	0 Ha	0 Ha	0%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Lab. Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Penyusunan Profil Emisi (GRK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan (LH)	0 Unit	3 Unit	0%
4	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan (TJSP) (BUBK) dan (PM)	13 Perusahaan	13 Perusahaan	100%
		Asistensi Pengendalian RKU, dan RKT RPHD Pada	7 Izin	7 Izin	100%
		Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/HKM/Desa	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Wilayah UPT KPH Rokan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivasitas
		Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai Bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Tahura SSH	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di UPT KPH Suligi Batu Gajah	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
		Pengembangan Perhutanan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	13 Laporan	13 Laporan	100%
		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Minas Tahura	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT PKPM	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT Perbenihan Tanaman Hutan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Mandau	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Rokan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Kampar Kiri	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Sorek	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Tebing Tinggi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Mandah	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Indragiri	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH KPH Singingi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPH Tasik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Bagan Siapi – Api	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Peningkatan Manajemen dan PTTL UPT KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Rekonsiliasi PNPB Sektor Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pengembangan Perbenihan	75.000 Batang	75.000 Batang	100%
		Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	100%
5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serbaguna (MPTS)	0 Lokasi	1 Lokasi	0%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	0 Unit	1 Unit	0%
		Pengembangan Data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan	2 Kasus	2 Kasus	100%
		Pembinaan, Pengawasan dan PKS Dana DBH-DR	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pencegahan dan PPKH dan Lahan	8 Kab/Kota	11 Kab/Kota	72,72%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau	10 Ha	10 Ha	100%
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3 Lokasi	2 Lokasi	150%
		Perlindungan dan Penanganan Hutan	13 Kali	13 Kali	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	44 Kali	44 Kali	100%
		Pengembangan Sarana dan PPKH dan Lahan	0 Unit	40 Unit	0%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi Batu Gajah	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi – Api	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla. UPT KPHP Minas Tahura	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%

Tabel 4.8
(Lanjutan)

No	Nama Program	Kegiatan	Realisasi Hasil	Rencana Hasil	Efektivas
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Kampar Kiri	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Sorek	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Tebing Tinggi	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Mandah	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Indragiri	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Singingi	1 Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	100%
		Rehabilitasi Mangrove (DAK)	0 Ha	0 Ha	0%

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4.8, terdapat 13 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas dibawah 100%, 78 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas sama dengan 100%, dan 1 kegiatan dengan persentase nilai efektivitas lebih dari 100%.

4.3 Pembahasan Analisis *Value For Money* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020

Terdapat kriteria – kriteria yang ditentukan untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan elemen *value for money*, yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Mahsun (2013), kriteria ekonomis adalah sebagai berikut : (1) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis atau sangat ekonomis, (2) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan ekonomis berimbang atau cukup ekonomis, dan (3) jika diperoleh nilai perhitungan ekonomis lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak ekonomis.

Menurut Mahsun (2013), kriteria efisiensi adalah sebagai berikut : (1) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efisien, (2) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efisien berimbang atau cukup efisien, dan (3) jika diperoleh nilai perhitungan efisiensi lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan efisien atau sangat efisien.

Menurut Mahsun (2013), kriteria efektivitas adalah sebagai berikut : (1) jika diperoleh nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100%, maka dapat dinyatakan tidak efektif, (2) jika diperoleh nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%, maka dapat dinyatakan efektif berimbang atau cukup efektif, dan (3) jika diperoleh

nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100%, maka dapat dinyatakan efektif atau sangat efektif.

1. Aspek Ekonomis

Pada tahun 2019, terdapat 115 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 115 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Ini berarti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah berhemat pada 115 kegiatan. Selain itu, terdapat 2 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan sebesar 100% yaitu kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Model Minas Tahura. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 2 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun 2020, terdapat 86 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 86 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Ini berarti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah berhemat pada 86 kegiatan. Selain itu, terdapat 6 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan sebesar 100% yaitu kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura,

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut, Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian dan Rehabilitasi Mangrove (DAK). Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 6 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah rencanakan sebelumnya.

2. Aspek Efisiensi

Pada tahun 2019, terdapat 108 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 108 kegiatan ini dinyatakan efisien. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat 2 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisien sama dengan 100% yaitu kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dan Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Model Minas Tahura. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 2 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan sesuai dengan persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 7 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100% yaitu kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK), Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan, Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan, Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan, dan Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut Pada UPT Tebing Tinggi. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 7 kegiatan ini dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan kurang dari persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Pada tahun 2020, terdapat 85 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 85 kegiatan ini dinyatakan efisien. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat 6 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisien sama dengan 100% yaitu kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut, Asistensi Pengendalian RKU,RKT dan RKHPD Pada Perizinan Hutan Sosial, Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 6 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan sesuai dengan persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 1 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100% yaitu kegiatan Rehabilitasi Mangrove (DAK). Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 1 kegiatan ini dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang

dilakukan kurang dari persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

3. Aspek Efektivitas

Pada tahun 2019, terdapat 2 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100% yaitu kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Masyarakat. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 2 kegiatan ini efektif. Hal ini menunjukkan realisasi hasil/keluaran kegiatan melebihi ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh objek. Terdapat 91 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 91 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran dari kegiatan ini sesuai dengan ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan oleh objek. Terdapat 24 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100% yaitu kegiatan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung dan Kantor, Penyediaan Sarana dan Kearsipan, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengawasan Izin Lingkungan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK), Penyusunan Master Plan UPT Laboratorium Lingkungan, Rehabilitasi Hutan Mangrove di Provinsi Riau, Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan, Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII, Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Tindak Pidana Kehutanan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT KPH Bengkalis, Pengawasan, Pengamanan UPT KPH Sorek, Perlindungan Hutan dan Partisipatif Masyarakat di Wilayah UPT KPH Mandah, Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Patroli Pencegahan PKHL di UPT KPH Bengkalis Pulau, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Hutan, Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Mandah, Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan dan Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut Pada UPT Tebing Tinggi. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 24 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran kegiatan – kegiatan ini tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diinginkan oleh objek.

Pada tahun 2020, terdapat 1 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas lebih dari 100% yaitu kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 1 kegiatan ini efektif. Hal ini menunjukkan realisasi hasil/keluaran kegiatan melebihi ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh objek. Terdapat 78 kegiatan dengan nilai perhitungan efektivitas sama dengan 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 78 kegiatan ini dinyatakan efektif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran dari kegiatan ini sesuai dengan ekspektasi hasil/keluaran yang telah ditetapkan oleh objek. Terdapat 13 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efektivitas kurang dari 100% yaitu Penyediaan Makanan dan Minuman, Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengembangan Pendidikan

Lingkungan Hidup, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serbaguna (MPTS), Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian, Pencegahan PPKH dan Lahan, Pengembangan Sarana dan PPKH dan Lahan, dan Rehabilitasi Mangrove (DAK). Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 13 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran kegiatan – kegiatan ini tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diinginkan oleh objek.

Dilihat dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2020 yang belum efektif, ini memberikan dampak signifikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, banyaknya kegiatan yang memiliki persentase nilai sama dengan 100% yang berarti dampak kegiatan tersebut tidak melebihi ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, ini juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hanya menyesuaikan target mereka tanpa berusaha untuk melewati target yang ditentukan.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan merupakan 2 kegiatan yang telah memenuhi 3 elemen *value for money* pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 1 kegiatan yang memenuhi 3 elemen *value for money*, yaitu Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Kegiatan inilah yang memiliki pengelolaan

organisasi yang paling baik diantara kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yang mana hipotesisnya adalah akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*. Meskipun hampir semua kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 telah ekonomis dan efisien, namun tidak banyak kegiatan yang bersifat efektif dan memberikan dampak signifikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Banyak kegiatan yang memiliki nilai efektivitas sama dengan 100% yang berarti dampak kegiatan tersebut tidak melebihi ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Ini berarti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hanya menyesuaikan dengan target mereka tanpa berusaha untuk melewati target yang ditentukan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek ekonomis menunjukkan persentase nilai 96%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bersifat ekonomis
2. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek efisiensi menunjukkan persentase nilai 92%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bersifat efisien
3. Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pada tahun 2019 dan 2020 dilihat dari segi aspek efektivitas menunjukkan persentase nilai 1%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bersifat tidak efektif
4. Pada tahun 2019 dan 2020, hanya 3 kegiatan yang memenuhi elemen *value for money*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih belum memenuhi prinsip *value for money*.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diharapkan dapat mengevaluasi kembali program kegiatannya agar dapat memenuhi elemen *value for money* sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari objek penelitian yang memiliki data yang lebih lengkap. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk mendalami lagi informasi dan masalah dalam pelaksanaan program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, F. P (2021). Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Basri, Yesti Mutia. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Pekanbaru: Jurusan Akuntansi FE UR 2017.
- Dwinanda, Y. (2018). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Enre. (2020). Analisis *Value For Money* pada Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (periode 2014-2018). Medan.
- Husna, N. A (2018). Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017-2018. Sumatera Barat.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2020.
- Majid, Jamaluddin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan I, November 2019. Sulawesi Selatan.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad.(2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nasri, Laila Intan Syifa. (2018). Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan. Medan.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi kedua. 2014. Penerbit Salemba Empat.
- Putri, N. Z. A. (2020). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur.
- Pratiwi, Amelia. I., & Nursandia, E. (2017, July 10). Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*,11.
- Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016, Maret). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2014. *Jurnal*

EMBA, 4(1), 982-989.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. edisi ke 6. Penerbit : Alfabeta.

Triniyati. (2018). *Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan Pendekatan Value For Money Periode 2015-2017*. Medan.

Yanti, Novli. Sutardjo, Agus. Putri, Y. A. P (2021, Juni) Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018). Sumatera Barat.

Yuesti, Anik., Nih Luh Putu Sandraya Dewi., dan I Gusti ayu Asri Pramesti (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali; CV. Noah Aletheia.

Undang-Undang Republik Indonesia. (23,2014) Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

